

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Manusia di dalam kehidupannya harus berkomunikasi, artinya kehidupan seseorang masih memerlukan orang lain dan membutuhkan kelompok atau masyarakat untuk saling berinteraksi. Hal ini merupakan suatu hakekat bahwa sebagian besar pribadi manusia terbentuk dari hasil integrasi sosial dengan sesamanya. Dalam siklus kehidupan manusia sering dipertemukan satu sama lainnya dalam suatu wadah baik formal maupun nonformal.

Manusia itu adalah makhluk sosial dimana dia tidak bisa lepas atau tidak bisa hidup tanpa bantuan orang lain. Bentuk umum proses sosial adalah interaksi sosial, karena interaksi sosial merupakan syarat utama terjadinya aktivitas-aktivitas sosial (Soekanto, 2007: 55). Oleh sebab itu manusia perlu berinteraksi dengan orang lain untuk mempertahankan hidupnya.

Komunikasi adalah inti semua hubungan sosial apabila orang telah mengadakan hubungannya tetap, maka sistem komunikasi yang mereka lakukan akan menentukan apakah sistem tersebut mempererat atau mempersatukan mereka dan mengurangi ketegangan atau melenyapkan persengketaan apabila muncul. Peran Komunikasi adalah sesuatu yang sangat penting didalam menjalin hubungan dengan dan antar manusia lain, komunikasi ada beberapa tipe diantaranya adalah formal dan informal atau resmi dan tidak resmi.

Dalam pandangan Habermas, sebagian besar karya sebelumnya berfokus pada rasionalisasi tindakan rasional-bertujuan, yang telah menghasilkan pertumbuhan kekuatan-kekuatan produktif dan peningkatan di bidang pengendalian teknologis atas kehidupan (Habermas, 1970). Bentuk rasionalisasi demikian adalah masalah utama, mungkin yang besar di dalam dunia modern, sebagaimana bagi Weber dan Marx. Akan tetapi, masalahnya terletak pada rasionalisasi tindakan rasional-bertujuan, bukan pada rasionalisasi pada umumnya. Bagi Habermas, sebenarnya penangkal untuk masalah rasionalisasi tindakan rasional-bertujuan terdapat di dalam rasionalisasi tindakan komunikatif.

Rasionalisasi tindakan komunikatif menghasilkan komunikasi yang bebas dari dominasi, komunikasi yang bebas dan terbuka. Di sini rasionalisasi meliputi

emansipasi, “*menghilangkan pembatasan-pembatasan pada komunikasi*” (Habermas, 1970: 118;). Habermas memaparkan yang sudah disebutkan sebelumnya mengenai legitimasi dan lebih umum mengenai ideologi dipadukan. Yakni, hal tersebut adalah dua penyebab utama komunikasi yang berubah bentuk, penyebab yang harus dilenyapkan jika kita ingin mempunyai komunikasi yang bebas dan terbuka (Habermas, 1979).

Pada level norma sosial, rasionalisasi demikian akan menghasilkan penurunan penindasan normatif dan kekuatan yang menghasilkan peningkatan di dalam keluwesan individual dan reflektivitas. Pengembangan sistem normatif baru yang kurang membatasi atau tidak membatasi tersebut terletak di jantung teori evolusi sosialnya Habermas. Bukannya suatu sistem produktif, rasionalisasi bagi Habermas (1979) menghasilkan suatu sistem normatif baru yang kurang menyelewengkan.

Bagi Habermas titik akhir evolusi tersebut ialah suatu masyarakat rasional (Delanty, 1997). Rasionalitas di sini berarti penghilangan rintangan-rintangan yang mengubah bentuk komunikasi, tetapi secara lebih umum itu berarti suatu sistem komunikasi tempat ide-ide disajikan dan dibela terhadap kritik secara terbuka, kesepakatan yang tidak dipaksakan berkembang selama proses argumentasi. Untuk memahami hal itu dengan lebih baik, kita membutuhkan rincian yang lebih banyak atas teori komunikasi Habermas.

Habermas membedakan antara tindakan komunikatif yang sudah didiskusikan sebelumnya dan wacana (*discourse*). Sementara tindakan komunikatif terjadi di dalam kehidupan sehari-hari (Habermas, 1957: 107-108)

Tindakan Komunikasi menurut Jurgen Habermas merupakan rasionalitas komunikatif dalam bukunya “*The Theory Of Communicative Action (Reason and The Rationalization Of Society)*”. Teori Jurgen Habermas merupakan pembaharuan dari teori kritis sekolah Frankfurt yang telah jatuh menjadi ideologi. Habermas melihat dimensi komunikasi merupakan sebagai praksis manusia, dimana sebelumnya dalam lingkungan teori kritis yang berpatokan kepada Marxisme praksis direduksi sebagai kerja dan mensekunderkan hubungan sosial dibawah alat produksi. Teori Tindakan Komunikasi Habermas sebagai kerangka atau titik pijak penulis dalam penelitian tindakan komunikasi masyarakat nelayan dalam situasi

konflik laten, suatu usaha menghubungkan antar keputusan Juragan dengan buruh yakni menyelidiki anggapan-anggapan konflik laten dari interaksi sosial dengan menekankan dimensi komunikatif dalam tindakan komunikasi yang rasional. Dalam tindakan komunikatif Habermas merupakan upaya diskursus etika yang bersifat praktis, bukan sekedar anjuran etis yang bersifat impretatif individual melainkan prosedur argumentasi moral melalui tindakan yang ditimbulkan dalam hal ini peneliti mengkorelasikan tindakan komunikasi masyarakat nelayan dalam situasi konflik laten antara dan juragan.

Dahrendorf membedakan tiga tipe kelompok yang luas. Yang pertama adalah *kelompok kuasi*, atau himpunan pemangku posisi dengan kepentingan-kepentingan peran yang identik (Dahrendorf, 1959: 180)

Cara-cara yang umum adalah karakteristik kelompok-kelompok kepentingan yang direkrut dari kelompok-kelompok kuasi. Kelompok kepentingan adalah kelompok di dalam arti yang ketat istilah sosiologis, dan mereka adalah agen nyata konflik kelompok. Mereka mempunyai suatu struktur, suatu bentuk, organisasi, suatu program atau tujuan, dan suatu personalia anggota atau orang-orang yang benar terlibat di dalam konflik kelompok (Ritzer, 2012)

Dahrendorf mengatakan, konsep-konsep mengenai kepentingan laten dan nyata, kelompok-kelompok kuasi, kelompok-kelompok kepentingan, dan kelompok-kelompok konflik, adalah dasar untuk menjelaskan konflik sosial. Di bawah kondisi-kondisi *ideal* tidak dibutuhkan variabel-variabel lain. Akan tetapi, karena kondisi-kondisi tidak pernah ideal, banyak faktor yang berbeda betul-betul ikut campur dalam proses itu. Dahrendorf menyebutkan kondisi-kondisi teknis seperti personalia yang memadai, kondisi-kondisi politis seperti seluruh iklim politis, dan seperti kondisi-kondisi sosial seperti adanya mata rantai-mata rantai komunikasi. Cara orang yang direkrut menjadi kelompok kuasi adalah kondisi sosial lain yang penting bagi Dahrendorf. Dia merasa bahwa jika perekrutan bersifat acak dan ditentukan dan ditentukan secara kebetulan, tidak mungkin muncul suatu kelompok kepentingan, begitu pula kelompok konflik (Ritzer, 2012).

Kajian tentang kehidupan masyarakat Pulau Mandangin ditinjau dari pemahaman Dahrendorf di atas mengisyaratkan bahwa nelayan buruh sebagai rekrutan tidak memiliki alat-alat produksi dan dalam kegiatan sebuah unit perahu

sleret. Nelayan buruh hanya menyumbangkan jasa tenaganya pada para cukong atau pemilik perahu sebagai pemegang kepetingan modal atau dominator peluang, dengan memperoleh hak-hak yang sangat terbatas.

Kedua, ditinjau dari tingkat skala investasi modal usahanya, struktur masyarakat nelayan terbagi ke dalam kategori nelayan besar dan nelayan kecil. Nelayan besar investasi sekitar Rp. 550.000.000 (perahu seret) sedangkan nelayan kecil investasi sekitar Rp. 35.000.000 (perahu eder, lojulo dan butek), disebut sebagai nelayan besar karena jumlah modal yang diinvestasikan dalam usaha perikanan relatif banyak, sedangkan pada nelayan kecil justru sebaliknya.

Ketiga, dipandang dari tingkat teknologi peralatan tangkap yang digunakan, masyarakat nelayan terbagi ke dalam kategori nelayan modern dan nelayan tradisional. Nelayan-nelayan modern menggunakan teknologi penangkapan yang lebih canggih dibandingkan dengan nelayan tradisional. Nelayan modern dapat diketahui dengan alat tangkap jaring dengan menggunakan mesin sebagai alat bantu proses penarikan jaring ketika sudah sedang penangkapan, begitu juga sebaliknya. Berdasar observasi awal yang dilakukan peneliti, diperoleh informasi dari Syamsul Arifin (9 September 2016), seorang tokoh nelayan Pulau Mandangin. Syamsul Arifin menyatakan.

"reng majeng samangken padheh bannyak ngangguy mesin ban alat tangkep modern, lambe' mun majeng nggangguy dhejung ban lajer tor jaring se angguy bisanah tak acem macem kadhih mangken bedeh bubuh, jaring ngangguy tenaga mesin mun najek pajeng ban ngangyuy dhemer led lambe' ngangguy storking"

Artinya, buruh nelayan saat ini banyak menggunakan mesin dan alat tangkap modern, kalau dulu melaut menggunakan dayung dan layar serta jaring yang dipakai tidak beragam seperti saat ini ada bubuh, jaring menggunakan tenaga mesin kalau menarik jaring dan menggunakan lampu LED dulu menggunakan storking.

Berdasarkan pernyataan tersebut penulis membangun persepsi bahwa, baik secara horizontal maupun vertikal kehidupan nelayan sangat dipengaruhi oleh organisasi penangkapan ikan dan tingkat pendapatan yang dicapai. Posisi semakin strategis dalam organisasi kerja nelayan dan semakin besar pendapatan, semakin besar pula kemungkinan menempati posisi yang tinggi dalam stratifikasi sosial.

Jaringan kerja antara juragan dan nelayan biasa diibaratkan sebagai suatu jaring laba-laba yang saling berkaitan. Jaring yang memiliki satu fokus atau tujuan,

yakni menjual tangkapan ikan ke pasaran atau konsumen, baik di pasar atau daerah lain. Kehidupan masyarakat Mandangin yang ada di pesisir pantai pada umumnya tidak dapat dipisahkan dengan ekosistemnya.

Fenomena awal menunjukkan adanya konflik antara juragan dan nelayan buruh, pada masyarakat nelayan di Pulau Mandangin merupakan suatu konflik laten/senyap/*manifest* yang ada di masyarakat berupa rasan-rasan tidak sampai terjadi kekerasan fisik, karena ketidakkuatan nelayan pada juragan disebabkan oleh adanya sistem hutang piutang pada juragan (Hotimah: 2016). Selain itu menurut salah satu tokoh masyarakat mengatakan bahwa adanya ketidak mampuan dan ketidakleluasaannya menyampaikan sebuah pesan terhadap juragan. Biasanya tindakan komunikasi atau perilaku komunikasi yang ditunjukkan buruh nelayan dengan tidak ikutnya melaut walau sudah ada pesan sebelumnya dari *penyusol* (pemberi pesan keberangkatan kerja).

Sejauh ini sebagian besar masyarakat nelayan belum banyak dilakukan pengkajian tentang terjadinya perubahan strukur sosial, tindakan komunikasi masyarakat nelayan berdampak terhadap kehidupan sosial ekonomi masyarakat. Melihat latar belakang ini menarik dikaji lebih jauh tentang tindakan komunikasi masyarakat nelayan dalam situasi konflik laten, motif komunikasi dan tindakan komunikasi dalam peristiwa konflik laten, sehingga topik ini menarik dikaji peneliti untuk memecahkan permasalahan dan menjadi bahan kajian publik yang ada di Pulau Mandangin.

Masyarakat Pulau Mandangin Sampang pada umumnya selama ini menekuni sektor nelayan tangkap dan mayoritas bermata pencaharian nelayan. Pada umumnya di wilayah Madura mengalami musim angin barat berlangsung dalam bulan Desember sampai dengan Januari, Pengaruh musim barat tersebut cukup berpengaruh pada seluruh aktivitas wilayah pertanian dan wilayah pesisir diantara kesejahteraan masyarakat. Kondisi ini menyebabkan terpaan angin, disertai hujan lebat dan ombak besar yang senantiasa dihadapi oleh kaum nelayan, sehingga pada musim-musim seperti ini terutama bulan-bulan Desember sampai Januari kebanyakan para nelayan tidak melaut. Keadaan demikian mengakibatkan nelayan sangat sukar melakukan penangkapan ikan, Olehnya itu pada masyarakat

nelayan terdapat karakteristik yang mencolok yaitu ketergantungan pada musim, maka pada musim penangkapan, para nelayan pada sibuk melaut.

Sebaliknya, pada musim paceklik kegiatan melaut menjadi berkurang sehingga banyak nelayan yang terpaksa menganggur. Dengan bergantungnya masyarakat nelayan terhadap sumber pendapatan dari aktifitas penangkapan ikan dilaut. Yang sarana penangkapannya menggunakan alat-alat produksi yang hanya dimiliki oleh juragan. Juragan nelayan ini merupakan nelayan pemilik perahu dan alat penangkap ikan yang mampu mengubah para nelayan sebagai pembantu dalam usahanya menangkap ikan di laut. Nelayan juragan ada dua macam, yaitu nelayan juragan laut, dan nelayan juragan darat yang mengendalikan usahanya dari daratan, orang yang memiliki perahu, alat penangkap ikan, atau pemilik alat reproduksi (kapal seret) istilah nama kapal nelayan Mandangin.

Buruh nelayan yang mempunyai alat produksi sendiri mempunyai sekup penangkapan atau penangkapan alat ikan yang relatif kecil (*Palkapalan, Eder, Lojulo dan butek*) yang cenderung bekerja sendirian ketimbang buruh nelayan (*pandhiga*) yang bekerja pada juragan, mengukuhkan juragan sebagai struktur nelayan yang berkuasa.

Hal ini menyebabkan ketidak berdayaan buruh nelayan untuk ikut andil dalam mengambil keputusan terhadap ketimpangan pembagian hasil yang diputuskan oleh juragan, modal dalam usaha penangkapan ikan merupakan unsur paling vital yang hanya dikuasai oleh pedagang perantara atas modal memberikan peluang kepada juragan untuk mengembangkan usahanya menjadi lebih besar atau meningkat, hubungan tersebut terjadi dalam utang piutang yang pengembaliannya ditangguhkan pada kemampuan kerja buruh nelayan dalam beraktifitas menangkap ikan, sementara hasil tangkapan ikan setelah sampai didarat sepenuhnya menjadi hubungan antara juragan dengan pedagang perantara atau juragan darat. Sedangkan buruh nelayan yang mempunyai alat tangkap kecil (*palkapalan* atau *butek* dan *lojulo*).

Nelayan dengan alat tangkap kecil biasanya merupakan masyarakat yang kurang berdaya secara finansial dan dalam bekerja menggunakan alat tangkap sederhana seperti bubuh dan alat pancing. Nelayan golongan tersebut biasanya meminjam modal mencari ikan dari pemilik modal atau orang lain dengan

perjanjian tertentu. Pihak pemberi pinjaman (Juragan darat/pengepul) biasanya mengikat para peminjam dengan perjanjian tertentu, seperti penyeteroran hasil tangkapan atau dengan pola bagi hasil. Sementara itu nelayan *lojulo* menggunakan pola pendanaan berbeda. Pemilik modal-lah yang menentukan harga hasil tangkapan nelayan *lojulo* sebagai bentuk perikatan atas transaksi peminjaman modal yang telah dilakukan sebelumnya.

Pendanaan tradisional seperti ini mirip pola *ijon* di dunia pertanian di tanah Jawa, dimana pemilik modal berkuasa penuh atas hasil pertanian. Bentuk pendanaan seperti ini menyebabkan buruh nelayan tidak mempunyai hak kuasa dalam menentukan harga atas tangkapan hasil dari jerih payahnya sendiri. Kondisi ini membuat buruh nelayan tidak memiliki keberdayaan dalam mekanisme penentuan harga produk.

Situasi usaha perikanan yang tidak kondusif secara finansial menyebabkan buruh nelayan selalu terperangkap kemiskinan yang berkelanjutan atau yang secara sosiologis disebut sebagai kemiskinan struktural. Jenis kemiskinan seperti ini mempersempit ruang hidup rumah tangga masyarakat nelayan. Situasi ini diperparah dengan tidak adanya transparansi upah upah kerja, ongkos atau modal produksi, pemeliharaan alat kerja dan pergantian komponen kapal atau alat tangkap, serta rencana harga produk yang seharusnya disampaikan oleh juragan dan *jlaros* (Nahkoda atau komunikator sebagai perwakilan pemilik ketika mencari ikan di laut). Akibatnya nelayan lagi-lagi dirugikan karena tidak memiliki rencana kerja yang pasti terkait dengan jenis dan harga komoditi terbaik yang ada pada hari tersebut.

Situasi tersebut pada akhirnya memunculkan kesenjangan sosial yang berujung pada lahirnya konflik dalam bentuk laten. Konflik pada dasarnya adalah munculnya dua pihak yang saling berbeda pendapat dan melakukan tindakan untuk mempertahankan pendapat, pendirian, atau kepentingannya. Konflik yang tidak nyata disebut sebagai konflik laten. Disebut laten karena pihak eksternal akan kesulitan mengidentifikasi pihak-pihak yang berkonflik, karena konflik yang muncul sebatas adanya kegelisahan. Pada masyarakat nelayan Pulau Mandangin kegelisahan ini ditandai dengan munculnya pergunjingan di antar nelayan, keluhan atau omelan *jlaros*, dan nada suara meninggi dan gestur khas para juragan pada saat

penimbangan ikan. Konflik yang lebih riil dapat berbentuk perdebatan sengit, gesekan fisik, hingga terjadinya perang. Jenis konflik riil seperti ini belum ditemukan penulis pada saat melakukan observasi awal.

Akan tetapi, peneliti belum memahami secara pasti bentuk, letak, dan berbagai hal yang menjadi aspek pembentuk konflik tersebut. Untuk memahami hal tersebut, peneliti meyakini bahwa harus terlebih dahulu mengungkap lebih mendalam dan komprehensif berbagai bentuk tindakan komunikasi yang dilakukan antara pemilik modal, *jlarios*, dengan para nelayan.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas maka peneliti merumuskan masalah sebagai berikut,

1. Bagaimana tindakan komunikasi nelayan dalam situasi konflik laten dengan *jlarios* di laut dan dengan juragan atau pemilik modal di darat?
2. Bagaimana tindakan komunikasi *jlarios* dengan juragan atau pemilik modal di darat dan dengan para nelayan pada saat melaut ?
3. Bagaimana tindakan komunikasi para pemilik modal atau juragan pada *jlarios* sebelum melaut dan pada para nelayan pada saat transaksi pembayaran hasil tangkapan ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas maka peneliti memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana tindakan komunikasi nelayan dalam situasi konflik laten dengan *jlarios* di laut dan dengan juragan atau pemilik modal di darat.
2. Untuk mengetahui bagaimana tindakan komunikasi *jlarios* dengan juragan atau pemilik modal di darat dan dengan para nelayan pada saat melaut.
3. Untuk mengetahui bagaimana tindakan komunikasi para pemilik modal/ juragan pada *jlarios* sebelum melaut dan pada para nelayan pada saat transaksi pembayaran hasil tangkapan.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Akademis

Diharapkan nantinya penelitian ini akan bermanfaat sebagai pengetahuan baru dan sumber referensi bagi para peneliti selanjutnya dalam kajian penelitian yang sama.

1.4.2 Manfaat Praktis

Penelitian kali ini, diharapkan bermanfaat bagi banyak pihak yakni :

1. Sebagai pedoman mahasiswa dan masyarakat umum untuk mengetahui bagaimana tindakan komunikasi nelayan dalam situasi konflik laten.
2. Menjadi sebuah rujukan atau referensi bagi ilmu sosial, khususnya ilmu komunikasi.
3. Diharapkan dapat menambah wawasan dan hasanah ilmu pengetahuan khususnya tentang kajian tindakan komunikasi nelayan.
4. Untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat nelayan tentang tindakan komunikasi dalam kehidupan sosial.
5. Menjadi sebuah pertimbangan pemerintah dalam menindak atau membuat kebijakan tentang perikanan.